

Tantangan dan Solusi dalam Memberikan Advokasi Hukum Bagi Hak Anak Imigran

Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra^{1)*}, Atikah Rahmi²⁾

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

***Corresponden Author:**

ffebbytaz@gmail.com

Abstact

Immigrant children often face barriers in accessing their rights, particularly within the legal and justice systems. These challenges encompass a lack of understanding of the destination country's laws, limited access to legal services, and inadequate support in resolving legal issues. Factors such as cultural differences, language barriers, and limited access to information further complicate the ability of immigrant children to obtain proper legal assistance. Moreover, divergent approaches, policies, or priorities among partners can hinder effective collaboration in addressing legal advocacy challenges for immigrant children. This initiative also aims to provide better access to legal information for immigrant children through appropriate guidance and resources. The outreach activities employ various methods such as outreach programs, public education campaigns, and legal training to raise awareness about immigrant children's rights. Panel discussions and fundraising events help broaden public understanding and garner broader support for advocating immigrant children's rights. The primary challenges for immigrant children lie in accessing equitable legal protection, including difficulties in identity recognition, unlawful detention, and limited access to education and healthcare services. Solutions to address these challenges involve multiple approaches, such as outreach programs, the utilization of information technology, tailored educational materials, as well as public campaigns and fundraising events to enhance public awareness.

Keyword: Immigrant children; Challenges; Solutions.

Abstrak

Anak-anak imigran sering mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak mereka, khususnya dalam sistem hukum dan keadilan. Tantangan ini mencakup minimnya pemahaman terhadap hukum negara tujuan, akses terbatas terhadap layanan hukum, serta kurangnya dukungan dalam penyelesaian masalah hukum. Faktor-faktor seperti perbedaan budaya, bahasa, dan akses terhadap informasi turut mempersulit anak-anak imigran mendapatkan bantuan hukum yang layak. Selain itu, perbedaan pendekatan, kebijakan, atau prioritas di antara mitra bisa menghalangi kolaborasi yang efektif dalam menyelesaikan tantangan advokasi hukum bagi anak-anak imigran. Kegiatan ini juga bertujuan memberikan akses yang lebih baik pada informasi hukum bagi anak-anak imigran dengan panduan dan sumber daya yang sesuai. Kegiatan pengabdian ini menggunakan berbagai metode seperti penyuluhan, kampanye pendidikan publik, dan pelatihan hukum untuk meningkatkan kesadaran akan hak anak imigran. Diskusi panel dan penggalangan dana membantu memperluas pemahaman masyarakat dan mendapatkan dukungan lebih luas dalam advokasi hak anak imigran. Tantangan utama bagi anak-anak imigran terletak pada akses terhadap perlindungan hukum yang setara, mencakup kesulitan dalam pengakuan identitas, penahanan yang tidak sah, dan akses terbatas terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Solusi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan berbagai pendekatan, seperti penyuluhan, penggunaan teknologi informasi, pengembangan

materi edukasi yang disesuaikan, serta kampanye publik dan acara penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Kata kunci: Anak Imigran; Tantangan; Solusi

PENDAHULUAN

Anak-anak imigran seringkali menghadapi sejumlah hambatan dalam akses terhadap hak-hak mereka, terutama dalam konteks hukum dan keadilan (Ryan, 2021).

Masalah-masalah ini sering melibatkan ketidakpahaman terhadap sistem hukum negara tujuan, minimnya akses terhadap layanan hukum yang memadai, serta kurangnya dukungan dalam proses legalisasi atau penyelesaian kasus hukum (Sofian & Desmarani, 2023).

Selain itu, anak-anak imigran juga rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Perbedaan budaya, bahasa, dan akses terhadap informasi menjadi faktor-faktor yang memperumit akses anak imigran terhadap bantuan hukum yang layak.



Gambar 1. Monitoring dan Evaluasi KKN Internasional.

Dalam konteks kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) internasional, menjadi penting untuk memahami tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak imigran terkait hak-hak mereka di negara tujuan. Melalui kegiatan KKN internasional, upaya advokasi hukum dapat menjadi solusi yang potensial untuk

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, penting untuk membangun kerja sama

meningkatkan pemahaman, memberikan akses terhadap informasi hukum, dan memperjuangkan hak-hak anak imigran secara lebih efektif (Arief, dkk, 2023).

Mitra, terutama lembaga atau organisasi yang terlibat dalam advokasi hukum, mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, termasuk tenaga kerja, keuangan, dan akses terhadap infrastruktur yang diperlukan. Hal ini dapat membatasi kemampuan mereka dalam memberikan layanan advokasi yang luas dan efektif bagi anak-anak imigran. Mitra yang terlibat dalam kegiatan advokasi hukum mungkin memiliki pendekatan, kebijakan, atau prioritas yang berbeda. Ini dapat menghambat kolaborasi yang efektif atau menyatukan visi bersama dalam memberikan solusi terhadap tantangan advokasi hukum bagi anak-anak imigran (Suriati, dkk, 2022).

Beberapa mitra mungkin memiliki keterbatasan dalam kapasitas atau pengetahuan khusus terkait dengan hak-hak anak imigran dan masalah-masalah hukum yang berkaitan. Ini bisa menghambat kemampuan mereka dalam memberikan solusi atau layanan yang memadai. Mitra dapat menghadapi kesulitan dalam membangun jaringan yang kuat dengan komunitas anak-anak imigran atau memiliki keterbatasan akses untuk mencapai anak-anak imigran yang membutuhkan advokasi hukum.

Terkadang, masalah koordinasi dan komunikasi antara mitra yang terlibat dalam kegiatan advokasi hukum dapat menjadi tantangan. Ini termasuk kesulitan dalam menyatukan strategi, mengelola informasi, atau menjaga aliran komunikasi yang efisien. yang kuat, transparansi komunikasi, dan upaya bersama dalam memahami serta

menangani tantangan yang dihadapi oleh mitra dalam advokasi hukum bagi hak anak imigran. Perencanaan yang matang dan kolaborasi yang erat akan membantu mengatasi berbagai hambatan yang mungkin muncul selama kegiatan ini berlangsung (Evi & Abustam, 2020).

Melalui kegiatan KKN internasional, tujuan utama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak anak imigran. Hal ini termasuk pemahaman akan tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak imigran dalam akses terhadap sistem hukum di negara tujuan mereka. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, tujuan kedua adalah memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi hukum bagi anak-anak imigran. Ini termasuk memberikan panduan, sumber daya, dan bantuan dalam memahami hak-hak hukum yang mereka miliki di negara tujuan.

Tujuan selanjutnya adalah mendorong advokasi hukum yang lebih kuat bagi hak-hak anak imigran. Melalui kolaborasi dengan lembaga-lembaga hukum lokal maupun internasional, diharapkan dapat diciptakan solusi-solusi konkret untuk mengatasi hambatan-hambatan hukum yang dihadapi anak-anak imigran.

Dalam upaya memberikan solusi bagi tantangan advokasi hukum bagi anak-anak imigran, tujuan lain adalah mengintegrasikan kearifan lokal dengan pendekatan yang bersifat internasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang kontekstual dan relevan dengan kondisi lokal anak-anak imigran di negara tujuan mereka. Tujuan-tujuan tersebut mencerminkan upaya untuk memberikan solusi konkret terkait tantangan advokasi hukum bagi hak-hak anak imigran melalui kegiatan KKN internasional (Wibowo, 2020).

Memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat akan hak-hak anak imigran, serta mengenai tantangan-tantangan yang mereka hadapi dalam konteks hukum.

Ini dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap anak-anak imigran di masyarakat. Menyediakan sumber daya, panduan, dan informasi yang diperlukan bagi anak-anak imigran untuk memahami hak-hak hukum mereka di negara tujuan. Hal ini akan memberikan mereka kepercayaan diri dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjaga hak-hak mereka.

Mendorong adanya dukungan yang lebih kuat dari lembaga-lembaga hukum lokal maupun internasional untuk melindungi hak-hak anak imigran. Ini dapat mencakup layanan bantuan hukum, advokasi, dan upaya konkrit untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi anak-anak imigran (Fredy, 2023).

Membangun kolaborasi antara lembaga-lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintah baik di tingkat lokal maupun internasional untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan holistik terhadap masalah-masalah hukum yang dihadapi anak-anak imigran. Menjadi langkah nyata dalam melindungi hak asasi manusia anak-anak imigran. Dengan memperkuat advokasi hukum, kegiatan ini dapat menjadi jalan untuk menegakkan hak-hak dasar mereka secara lebih efektif.

Menemukan titik temu antara kebutuhan anak-anak imigran dengan lingkungan dan kearifan lokal di negara tujuan mereka dengan cara yang tidak mengabaikan perspektif internasional dalam perlindungan hak-hak asasi manusia. Melalui manfaat-manfaat ini, kegiatan pengabdian masyarakat tentang advokasi hukum bagi hak anak imigran diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kelangsungan dan perlindungan hak-hak anak imigran di seluruh dunia (Ryan, 2021).

Membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga-lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan agensi terkait untuk meningkatkan akses anak-anak imigran terhadap layanan hukum. Kerjasama ini

dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan efektivitas advokasi. Menyelenggarakan program pelatihan dan pendidikan hukum bagi anak-anak imigran untuk meningkatkan pemahaman mereka akan hak-hak yang dimilikinya. Ini dapat dilakukan melalui workshop, seminar, atau kampanye pendidikan yang bertujuan memberdayakan anak-anak imigran secara hukum.

Membuat panduan atau materi informasi hukum yang sederhana dan mudah dipahami bagi anak-anak imigran dan keluarga mereka. Media ini dapat berupa brosur, infografis, atau platform daring yang memfasilitasi akses informasi secara lebih terbuka. Mengadvokasi perubahan kebijakan yang mendukung hak-hak anak imigran, termasuk akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Melalui upaya advokasi ini, diharapkan kebijakan dapat lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan anak-anak imigran.

Memanfaatkan teknologi, seperti aplikasi atau platform daring, untuk meningkatkan akses anak-anak imigran terhadap layanan hukum. Hal ini dapat mempermudah mereka dalam mencari informasi, konsultasi hukum, atau mendapatkan bantuan secara online. Memperkuat kerjasama internasional antar lembaga hukum, organisasi, dan pemerintah untuk menyediakan perlindungan dan akses hukum yang lebih baik bagi anak-anak imigran yang bermigrasi lintas negara

Memperhatikan keberagaman budaya dan bahasa dalam memberikan layanan advokasi hukum bagi anak-anak imigran. Menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap aspek-aspek ini akan membantu memperoleh kepercayaan dan partisipasi yang lebih besar dari komunitas anak-anak imigran. Menerapkan solusi-solusi ini dengan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak dapat membantu mengatasi

hambatan dalam memberikan advokasi hukum bagi hak anak imigran yang seringkali kompleks dan multidimensional.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tantangan Pengakuan Identitas dan Kewarganegaraan bagi Anak Imigran?
2. Bagaimana Kendala Akses Terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak Imigran?
3. Bagaimana Tantangan Bahasa dan Budaya dalam Akses Pendidikan Bagi Anak Imigran?

METODE

Dua puluh lima mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) berpartisipasi dalam Program Pengabdian Masyarakat Internasional (KKN) di PCIM Malaysia mulai dari tanggal 6 September hingga 29 September 2023, terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat lokal serta memahami tantangan hukum yang dihadapi oleh anak-anak imigran di wilayah tersebut.

Selain melibatkan anak-anak imigran dan komunitasnya, lembaga hukum lokal dan internasional juga menjadi subjek yang terlibat. Organisasi non-pemerintah yang berfokus pada hak asasi manusia turut menjadi subjek dalam kegiatan ini, karena peran mereka dalam memberikan bantuan dan dukungan bagi anak-anak imigran sangat penting (Rachma, dkk, 2023).

Terakhir, pemerintah atau institusi yang terkait dengan kebijakan imigrasi menjadi subjek penting dalam upaya mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan mendukung hak-hak anak-anak imigran. Keseluruhan subjek yang terlibat dalam pengabdian ini memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan dan akses terhadap hak anak-anak imigran di negara tujuan mereka.

Menargetkan subjek-subjek ini dalam kegiatan pengabdian memberikan kesempatan untuk merangkul berbagai pihak yang relevan dan memastikan bahwa upaya advokasi hukum bagi hak anak imigran dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini meliputi berbagai metode yang meliputi penyuluhan dan kampanye pendidikan publik, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak imigran di masyarakat. Selain itu, pelatihan hukum dan hak asasi manusia diselenggarakan untuk memperluas pengetahuan anak-anak imigran tentang hukum negara tujuan mereka. Konsultasi hukum individu atau kelompok juga diberikan untuk membantu mereka memahami kasus hukum yang dihadapi (Surya, 2020).

Penggunaan teknologi informasi dimanfaatkan untuk memudahkan akses anak-anak imigran terhadap layanan hukum. Selain itu, pengembangan materi pendidikan dan panduan hukum dilakukan agar informasi yang relevan lebih mudah dipahami oleh anak-anak imigran. Akhirnya, diskusi panel dan acara penggalangan dana diselenggarakan untuk memperluas pemahaman masyarakat dan mendapatkan dukungan lebih luas dalam advokasi hak anak imigran.

Kombinasi dari berbagai metode ini dapat memberikan pendekatan holistik dalam memberikan advokasi hukum bagi anak-anak imigran. Perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak-anak imigran serta masyarakat di sekitarnya untuk memastikan efektivitasnya.

HASIL

Bapak Yoshi Iskandar, yang menjabat sebagai Fungsi Penerangan, Sosial, dan Kebudayaan di KBRI Malaysia, memberikan penjelasan mengenai UU No. 37 Tahun 1999 yang mengatur hubungan diplomatik serta

tugas utama seorang diplomat, termasuk representasi, perlindungan, negosiasi, promosi, pelaporan, dan manajemen. Dia juga membahas tantangan-tantangan dalam tugas diplomatik, termasuk di negara yang sedang mengalami konflik. Beliau berharap hal ini dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum UMSU, terutama bagi yang tertarik menjadi diplomat, untuk mempelajari diplomasi sejak dini. Iskandar juga membicarakan tentang imunitas diplomatik yang tidak mutlak, karena pejabat diplomatik bisa dinyatakan persona non grata jika melanggar imunitas mereka.



Gambar 2. Kunjungan Mahasiswa KKN Internasional di KBRI Malaysia.

Wakil Dekan III Fakultas Hukum UMSU, Atikah Rahmi, SH., MH, mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang baik dari KBRI Malaysia. Dia berharap kunjungan tersebut dapat memberikan semangat kepada mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya yang berminat dalam diplomasi atau hubungan internasional.



Gambar 3. Kunjungan Mahasiswa KKN Internasional di KBRI Malaysia.

Selanjutnya, para mahasiswa KKN internasional menyampaikan presentasi mengenai proyek-proyek yang telah mereka lakukan selama masa KKN di beberapa Pimpinan Cabang Istimewa Malaysia. Proyek-proyek ini mencakup berbagai bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan kebudayaan. Para mahasiswa memberikan presentasi yang informatif dan menggambarkan dampak positif dari proyek-proyek yang telah mereka jalankan.



Gambar 4. Pelepasan Mahasiswa KKN Internasional FH UMSU

Kunjungan ini juga memberikan kesempatan bagi para mahasiswa KKN Internasional untuk berbagi pengalaman mereka terkait pemahaman budaya, tradisi, dan tantangan yang mereka hadapi selama di Malaysia. Kegiatan KKN Internasional ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mereka tentang dunia yang lebih luas.

Memberikan advokasi hukum bagi hak anak imigran melalui kegiatan KKN internasional merupakan upaya yang signifikan namun penuh tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah kompleksitas regulasi dan perbedaan hukum antar-negara yang sering kali menjadi hambatan bagi anak-anak imigran dalam memperoleh perlindungan hukum yang layak. Di satu sisi, anak-anak imigran sering kali tidak memahami atau sulit mengakses sistem hukum di negara tujuan mereka. Di sisi lain, proses legalisasi atau penyelesaian kasus hukum dapat memakan waktu lama dan memerlukan sumber daya yang besar.

Selain itu, keterbatasan bahasa dan perbedaan budaya menjadi faktor tambahan yang memperumit akses mereka terhadap layanan hukum yang memadai. Adanya stigma atau diskriminasi terhadap imigran juga memperburuk situasi, membuat anak-anak imigran cenderung merasa takut atau enggan mencari bantuan hukum.

Kendati demikian, melalui kegiatan KKN internasional, terdapat potensi besar untuk mengatasi tantangan ini. Kolaborasi antara mahasiswa, lembaga akademis, lembaga hukum lokal, dan organisasi non-pemerintah dapat membuka jalan untuk memberikan solusi yang lebih holistik. Mahasiswa yang terlibat dalam KKN internasional dapat menjadi agen perubahan yang signifikan dengan membangun kesadaran, memberikan edukasi, dan menyediakan bantuan bagi anak-anak imigran.

Langkah-langkah ini mencakup penyediaan informasi hukum yang mudah dipahami, penyelenggaraan pelatihan hukum, konsultasi hukum individu, serta penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan akses terhadap layanan hukum. Selain itu, kegiatan seperti diskusi panel atau kampanye penggalangan dana dapat membantu memperluas jaringan dukungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat

tentang hak anak imigran.



Gambar 5. Perpisahan KKN Internasional FH UMSU

Namun, penting untuk diingat bahwa keberhasilan advokasi hukum bagi anak-anak imigran melalui KKN internasional memerlukan kerja keras dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak terlibat. Perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi anak-anak imigran serta upaya konkret untuk memecahkan masalah tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga harus mengintegrasikan aspek kultural dan kontekstual yang relevan dengan situasi anak-anak imigran di negara tujuan mereka. Dengan demikian, upaya advokasi hukum melalui KKN internasional dapat menjadi langkah awal yang penting menuju perlindungan hak anak imigran yang lebih baik di masa depan. Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional menjadi landasan utama yang dibuat oleh komunitas internasional untuk menjaga pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu.

Terdapat serangkaian perjanjian kunci dalam kerangka ini yang menjadi pedoman dalam menjamin hak asasi manusia. Pertama, Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, menggarisbawahi hak-hak dasar tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, atau kebangsaan. ICCPR menjamin hak-hak sipil dan politik dasar seperti kebebasan

beragama, ekspresi, hak atas kehidupan, dan keadilan.

Selanjutnya, ICESCR memberikan perlindungan atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. CRC memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak, mengakui hak-hak khusus mereka, termasuk hak atas pendidikan dan perlindungan dari eksploitasi. Sementara itu, CEDAW bertujuan untuk memastikan kesetaraan gender dan melindungi perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi. Perjanjian-perjanjian ini, bersama instrumen hukum lainnya, membentuk kerangka kerja yang mengikat bagi negara-negara yang telah meratifikasi, menegaskan kewajiban mereka dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia dalam wilayahnya. Negara-negara yang meratifikasi perjanjian-perjanjian ini memiliki tanggung jawab hukum untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut dalam hukum dan kebijakan domestik mereka.

Di Malaysia, berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum imigrasi, perlindungan anak, kewarganegaraan, dan lainnya, dipengaruhi oleh serangkaian undang-undang utama. Terdapat beberapa undang-undang kunci yang memiliki dampak signifikan dalam struktur hukum negara ini. Pertama, Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur proses kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembatalan status kewarganegaraan. Sementara itu, Undang-Undang Imigrasi menetapkan aturan tentang masuk, tinggal, dan keberadaan orang asing di Malaysia, termasuk perizinan, izin tinggal, penahanan, dan deportasi.

Perlindungan anak diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Hak Kanak-Kanak 2001 yang bertujuan melindungi anak dari eksploitasi dan kekerasan serta memberikan hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Meskipun Malaysia memiliki Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1999, implementasinya masih dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Selanjutnya, Undang-Undang Pendidikan mengatur sistem pendidikan di negara ini, termasuk hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan dan kebijakan pendidikan. Regulasi tentang ketenagakerjaan juga termasuk dalam Undang-Undang Buruh, yang mencakup perlindungan bagi pekerja, termasuk pekerja anak dan aspek ketenagakerjaan lainnya. Upaya melawan diskriminasi diatur dalam Undang-Undang Anti-Diskriminasi, termasuk larangan diskriminasi berdasarkan agama, etnis, dan faktor lainnya.

Selain itu, Undang-Undang Kesehatan mencakup berbagai aspek, mulai dari akses ke layanan kesehatan hingga standar kesehatan serta perlindungan dari penyakit menular. Meskipun kerangka hukum ini memberikan landasan hukum bagi kehidupan masyarakat, termasuk anak-anak imigran, implementasinya bisa bervariasi. Terkadang, terdapat interpretasi yang beragam dalam penerapan undang-undang tersebut, yang mempengaruhi tingkat perlindungan dan akses hak-hak individu, terutama anak-anak imigran, dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia yang fundamental, diakui secara universal, dan dijamin oleh berbagai instrumen hukum internasional dan nasional bagi setiap individu, termasuk anak-anak imigran. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dalam Pasal 26 mengakui hak individu atas pendidikan, mencakup pendidikan dasar yang wajib dan gratis, serta akses yang sama terhadap pendidikan tinggi. Sementara itu, Convention on the Rights of the Child (CRC) dalam Pasal 28 mengakui hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar, pengembangan bakat, dan pendidikan lanjutan yang relevan. International Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights (ICESCR) dalam Pasal 13 juga mengakui hak atas pendidikan, menekankan akses pendidikan dasar yang wajib dan akses yang merata untuk semua individu.

Di Malaysia, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dasar diakui dalam sistem pendidikan yang mencakup jenjang sekolah dasar hingga menengah. Program-program pendidikan dirancang untuk memastikan akses pendidikan bagi semua anak, termasuk anak-anak imigran. Kemungkinan adanya program-program khusus yang bertujuan untuk membantu anak-anak imigran dalam memperoleh akses pendidikan juga diakui. Inisiatif ini dapat meliputi program pembelajaran bahasa, bantuan keuangan, atau langkah lainnya untuk memastikan partisipasi anak-anak imigran dalam sistem pendidikan nasional.

Namun, ada beberapa tantangan yang mungkin dihadapi anak-anak imigran dalam mendapatkan pendidikan. Bahasa yang berbeda dapat menjadi kendala utama karena anak-anak imigran mungkin kesulitan dalam belajar di lingkungan yang menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa asli mereka. Faktor aksesibilitas, baik secara ekonomi, geografis, maupun sosial, juga dapat memengaruhi kemampuan anak-anak imigran untuk mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Terlebih lagi, potensi diskriminasi atau ketidaksetaraan dalam sistem pendidikan dapat menghambat akses mereka ke pendidikan yang layak.

Menjamin hak anak-anak imigran untuk mendapatkan pendidikan merupakan komitmen penting bagi negara-negara, termasuk Malaysia, dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Hal ini memberikan kesempatan pada setiap anak untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka dan komunitas yang mereka masuki.

Perlindungan dari penahanan yang tidak sah merupakan elemen krusial dalam hak asasi manusia yang menjamin individu tidak ditahan secara sewenang-wenang atau tidak adil, dan hal ini berlaku untuk semua individu, termasuk anak-anak imigran.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dalam Pasal 9 menegaskan hak setiap individu atas kebebasan dan keamanan pribadi serta larangan penahanan sewenang-wenang. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dalam Pasal 9 juga menekankan hak individu untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang dan hak atas proses hukum yang adil jika ditahan. Lebih lanjut, *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dalam Pasal 37 menekankan bahwa penahanan anak-anak harus menjadi langkah terakhir, untuk durasi sesingkat mungkin, dipisahkan dari orang dewasa, dan memberikan perlindungan khusus kepada mereka.

Tantangan yang dihadapi dalam melindungi anak-anak imigran dari penahanan yang tidak sah meliputi kemungkinan penahanan bersama orang dewasa atau penahanan dalam kondisi yang tidak memenuhi standar hak asasi manusia. Ketidakpastian status imigrasi atau proses hukum yang rumit juga dapat meningkatkan risiko anak-anak imigran untuk ditahan dalam kondisi yang tidak layak. Akses terbatas terhadap bantuan hukum juga menjadi masalah, karena anak-anak imigran mungkin kesulitan dalam mengakses bantuan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka terhadap penahanan yang tidak sah.

Perlindungan anak-anak imigran dari penahanan yang tidak sah adalah aspek penting dalam memastikan hak-hak dan kesejahteraan mereka dihormati. Diperlukan upaya yang kuat untuk memastikan bahwa sistem penahanan yang ada sesuai dengan standar internasional, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak imigran.

Hal ini melibatkan implementasi kebijakan yang memperhatikan hak-hak anak, pemisahan mereka dari penahanan orang dewasa, dan memberikan akses terhadap bantuan hukum yang diperlukan.

Dalam menemukan solusi yang efektif dalam memberikan advokasi hukum bagi hak anak imigran melalui kegiatan KKN internasional, beberapa pendekatan kritis perlu dipertimbangkan. Salah satu solusi yang menjadi fokus adalah memperluas akses anak-anak imigran terhadap informasi hukum yang relevan dan pemahaman yang mendalam mengenai hak-hak mereka. Langkah ini bisa diwujudkan melalui penyediaan materi pendidikan dan panduan hukum yang mudah dipahami, berbasis pada budaya dan bahasa anak-anak imigran, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak yang mereka miliki dan proses hukum yang relevan dengan kasus-kasus mereka.

Pelatihan hukum dan hak asasi manusia juga menjadi solusi krusial. Melalui pelatihan ini, anak-anak imigran dapat dilengkapi dengan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami sistem hukum di negara tujuan mereka, hak-hak yang mereka miliki, serta cara untuk memperjuangkan hak-hak tersebut. Penting untuk menyesuaikan materi pelatihan dengan kebutuhan dan situasi anak-anak imigran agar pelatihan tersebut memberikan manfaat yang maksimal.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi solusi penting dalam memudahkan akses anak-anak imigran terhadap layanan hukum. Aplikasi atau platform daring dapat digunakan untuk menyediakan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum secara cepat dan mudah diakses. Namun, perlu mempertimbangkan aksesibilitas teknologi tersebut oleh anak-anak imigran yang mungkin memiliki keterbatasan akses atau pemahaman terhadap teknologi tertentu.

Selain itu, kolaborasi dengan lembaga

hukum lokal dan internasional menjadi solusi yang krusial. Kerja sama ini memungkinkan untuk memperkuat advokasi hukum bagi anak-anak imigran, serta menyediakan bantuan dan layanan hukum yang lebih komprehensif.

Perlu adanya pendekatan yang holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, aktivis, serta komunitas lokal untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.

Namun, dalam menerapkan solusi-solusi ini, penting untuk memperhatikan konteks budaya dan kearifan lokal di negara tujuan anak-anak imigran. Solusi yang diusulkan harus sensitif terhadap keberagaman budaya dan bahasa, serta mampu mengatasi hambatan-hambatan yang spesifik yang dihadapi oleh anak-anak imigran dalam mengakses sistem hukum. Perlu juga evaluasi berkala terhadap efektivitas solusi-solusi yang diterapkan untuk menyesuaikan dan meningkatkan strategi advokasi hukum yang dijalankan.

Akses terhadap perlindungan hukum adalah hak asasi manusia yang mendasar, memastikan bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk memperoleh bantuan hukum dan mengakses sistem peradilan guna melindungi hak-hak mereka. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dalam Pasal 8 mengakui hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif di hadapan pengadilan yang kompeten, independen, dan adil.

Sementara *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dalam Pasal 14 menjamin hak individu untuk mendapatkan bantuan hukum dan akses ke pengadilan dalam menjaga dan melindungi hak-hak mereka. Pasal 40 dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menekankan hak anak-anak untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan di hadapan sistem peradilan yang memprioritaskan kepentingan

terbaik anak.

Di Malaysia, sistem peradilan memungkinkan hak akses terhadap bantuan hukum yang tersedia bagi warga negara maupun penduduk non-warga negara. Anak-anak imigran di Malaysia seharusnya juga memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum dan sistem peradilan guna melindungi hak-hak mereka. Namun, tantangan dalam akses terhadap perlindungan hukum mungkin muncul akibat status imigrasi mereka atau masalah lainnya.

Tantangan yang dihadapi anak-anak imigran dalam akses terhadap perlindungan hukum mencakup status imigrasi yang tidak pasti, yang bisa menjadi hambatan dalam mengakses bantuan hukum atau sistem peradilan.

Keterbatasan sumber daya atau akses terhadap informasi mengenai hak-hak hukum juga bisa menjadi kendala bagi mereka dalam memperoleh bantuan hukum yang diperlukan. Perbedaan bahasa dan budaya juga menjadi faktor yang dapat menghambat komunikasi dengan pengacara atau pemahaman terhadap proses hukum, terutama jika anak-anak imigran tersebut tidak fasih dalam bahasa lokal.

Memastikan akses yang setara terhadap perlindungan hukum adalah kunci dalam memastikan bahwa hak-hak anak-anak imigran dihormati dan dilindungi. Upaya untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum serta memastikan kesetaraan dalam sistem peradilan menjadi sangat penting untuk melindungi hak-hak mereka secara efektif.

Pengakuan identitas dan kewarganegaraan adalah aspek krusial dalam hak asasi manusia yang menjamin setiap individu memiliki pengakuan atas identitas mereka dan hak untuk memiliki kewarganegaraan. Pengakuan identitas meliputi hak setiap individu untuk diakui sebagai pribadi yang memiliki identitas yang jelas melalui dokumen resmi seperti akta

kelahiran atau paspor. Sementara kewarganegaraan merujuk pada status hukum seseorang sebagai warga negara dari suatu negara tertentu, memberikan hak-hak seperti perlindungan hukum, tinggal, dan hak-hak politik.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menegaskan pentingnya pengakuan identitas dan kewarganegaraan. Pasal 15 UDHR menetapkan bahwa setiap individu berhak atas kewarganegaraan dan tidak boleh kehilangan kewarganegaraannya secara sewenang-wenang. Pasal 7 CRC menegaskan hak setiap anak untuk mendapatkan registrasi kelahiran, identitas, dan kewarganegaraan.

Namun, anak-anak imigran seringkali menghadapi tantangan dalam pengakuan identitas dan kewarganegaraan. Mereka mungkin kesulitan memperoleh dokumen identitas seperti akta kelahiran atau paspor karena masalah administratif atau status imigrasi yang tidak jelas. Ketidakpastian status kewarganegaraan juga bisa terjadi jika mereka lahir di negara yang berbeda atau memiliki orang tua dengan kewarganegaraan yang berbeda.

Kesulitan administratif atau birokrasi yang kompleks juga dapat menjadi hambatan bagi anak-anak imigran dalam memperoleh pengakuan identitas dan kewarganegaraan. Memastikan akses yang setara terhadap dokumen identitas dan kewarganegaraan bagi anak-anak imigran merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak mereka yang mendasar.

Upaya untuk menyediakan akses yang setara dalam proses administratif dan perundang-undangan terkait identitas dan kewarganegaraan menjadi esensial dalam melindungi hak-hak anak-anak imigran.

KESIMPULAN

Tantangan utama terletak pada akses

terhadap perlindungan hukum yang setara bagi anak-anak imigran, yang meliputi kesulitan dalam pengakuan identitas dan kewarganegaraan, penahanan yang tidak sah, dan akses terbatas terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.

Sementara itu, solusi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan berbagai pendekatan. Penyuluhan, pelatihan, dan konsultasi hukum yang merata diakses oleh anak-anak imigran dapat meningkatkan pemahaman mereka akan hak-hak mereka serta membantu mereka memperoleh akses terhadap perlindungan hukum.

Penggunaan teknologi informasi dan pengembangan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka juga dapat membantu dalam memberikan informasi yang diperlukan. Diskusi panel, kampanye pendidikan publik, dan acara penggalangan dana dapat mendukung upaya advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu hak anak imigran.

Dengan adanya kolaborasi antara anak-anak imigran, komunitas lokal, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, serta pemerintah terkait kebijakan imigrasi, dapat tercipta solusi yang lebih komprehensif. Upaya sinergis ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak-anak imigran, melindungi hak-hak mereka, dan memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Melalui implementasi solusi-solusi ini, diharapkan bahwa anak-anak imigran dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari penahanan yang tidak sah, serta pengakuan identitas dan kewarganegaraan.

Kesimpulan utamanya adalah bahwa pendekatan holistik, berkelanjutan, dan terkoordinasi antara berbagai pihak menjadi kunci dalam memberikan advokasi hukum yang efektif bagi hak anak imigran dalam

konteks Kegiatan KKN Internasional.

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang inklusif dan progresif terkait hak anak imigran. Kebijakan ini harus mencakup perlindungan hak-hak dasar, seperti pendidikan, akses kesehatan, pengakuan identitas, dan kewarganegaraan. Perlu ada upaya untuk memperkuat hukum terkait hak anak imigran, termasuk penyusunan undang-undang yang jelas dan efektif untuk melindungi mereka dari penahanan yang tidak sah dan diskriminasi.

Meningkatkan akses anak-anak imigran terhadap layanan publik, seperti pendidikan dan kesehatan, merupakan langkah penting. Ini bisa melalui program khusus atau bantuan untuk membantu mereka menavigasi sistem layanan tersebut.

Pemerintah dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil untuk meningkatkan advokasi hukum bagi anak-anak imigran. Ini bisa dalam bentuk pelatihan, penyuluhan hukum, atau layanan konsultasi. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang ada. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui sejauh mana kebijakan yang ada berdampak pada kehidupan anak-anak imigran dan memperbaiki kebijakan yang tidak efektif.

Pemerintah dapat meluncurkan kampanye pendidikan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengertian masyarakat tentang hak anak imigran. Ini dapat membantu mengurangi stereotip dan diskriminasi yang mungkin dihadapi oleh anak-anak imigran. Kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dapat memberikan kesempatan untuk bertukar informasi dan praktik terbaik dalam melindungi hak anak imigran.

Mahasiswa dapat mengadakan kampanye kesadaran di lingkungan kampus untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu hak anak imigran. Workshop, seminar,

atau diskusi terbuka dapat membantu mengedukasi masyarakat kampus tentang tantangan yang dihadapi anak-anak imigran. Mahasiswa dapat memilih proyek KKN atau proyek kampus yang fokus pada memberikan bantuan hukum atau sosial kepada anak-anak imigran. Ini bisa berupa penyuluhan hukum, layanan konsultasi, atau inisiatif pendidikan bagi anak-anak imigran.

Mahasiswa dapat berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah atau lembaga hukum eksternal yang memiliki fokus pada advokasi hak anak imigran. Ini dapat membuka peluang untuk berkontribusi secara langsung dalam advokasi hukum. Mahasiswa dapat melakukan penelitian tentang isu-isu spesifik yang dihadapi anak-anak imigran dan mengembangkan solusi yang dapat diterapkan, baik dalam bentuk kebijakan, program, atau saran praktis.

REFERENSI

- Arief Fahmi Lubis, Kalijunjung Hasibuan, Paramita Andiani. (2023). Peran Dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. Vol. 02, No. 10, 964-972. <https://Wnj.Westscience-Press.Com/Index.Php/Jhhws/Index>
- Evi Rosdiyanti, Abustam. (2020). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia). *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*. Vol. 2 No. 2. 21-34. <http://Ejournal.Mandalanursa.Org/Index.Php/JIHAD/Index>
- Fredi Syahlulus Tarigan. (2023). Implikasi Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi Pengenalan Wajah: Kajian Literatur. *JUDGE: Jurnal Hukum*.

- Volume 04. Nomor 01. 16-20.
<https://Journal.Cattleyadf.Org/Index.Php/Judge>
- Meirina Nurlani. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak: Tinjauan Perspektif Keadilan Dan Kesejahteraan Anak. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*. 1:1 107-132.
<https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23397>
- Muhammad Surya Adi Wibowo. (2020). Pelaksanaan Proses Peradilan Dan Pemenuhan Hak Dalam Perlindungan Hukum Bagi Anak (Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). *Reformasi Hukum*, Vol. XXIV No. 1. 21-40.
- Ni Ketut Suriati, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. (2022). Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Aspek Hukum Internasional. *Ganesha Law Review*. Volume 4 Issue 2. 63-72.
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>
- Rachma Rizky Melania Latuconsina, Arman Anwar, Dyah Ridhul Airin Daties. (2023). Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Dari Ukraina Dalam Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Balobe law journal*. 3(1). 34-41.
- Ramdani. (2020). Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Negara Dan Keadilan*. 9(2). 130-137.
- Ryan Abraham Silalahi. (2021). Tinjauan Normatif Pembela Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*. Vol. 1. No. 2. 99-111.
<http://journal.unika.ac.id/index.php/jhpk>
- Sopian, Desmarani Helfisar. (2023). Inovasi Dalam Advokasi Hak Asasi Manusia:

Strategi Dan Pendekatan Hukum. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sain*. Vol. 02, No. 08, 692-701.
<https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/index>.